

## PEMBERDAYAAN PULAU-PULAU KECIL KALIMANTAN SELATAN DENGAN WISATA BUDAYA

Andi Nuralang\*  
Balai Arkeologi Banjarmasin

### Abstract

*Small islands have many potential resources that should be managed. In Kalimantan Selatan, the development of cultural tourism based on local cultural resources on small islands is potential to increase local regional income. Apart from this positif impact, we should be aware of the negative impact of cultural tourism development. To minimize this negative impact I propose to empower local people in managing local resources, pay attention to local traditional wisdoms, and give the first chance to local capital owners to participate in managing available resources. It is also important to undertake an accurate survey of the potential resources as the first step to develop cultural tourism in the small islands.*

Kata Kunci: pulau-pulau kecil, otonomi daerah, budaya, ekonomi, wisata budaya

### A. Pendahuluan

Pengelolaan secara tepat potensi pulau-pulau kecil dan terisolir di Indonesia menjadi semakin mendesak. Hal ini karena diramalkan, pada masa depan titik episentrum ekonomi dunia akan bergeser ke kawasan Pasifik, sedangkan sebagian wilayah Indonesia bersinggungan dengan kawasan Pasifik. Pakar futurologi John Hay mengungkapkan "Atlantik adalah samudera masa lampau, Mediterania (laut tengah) adalah samudera masa kini, dan Pasifik adalah samudera masa depan (John Naisbitt dan Patricia Aburdene, 1990).

Beberapa kontroversi soal format pengelolaan pulau-pulau kecil sempat muncul. Dari soal penyewaan pulau kecil hingga penambangan pasir yang

menyebabkan beberapa pulau di Kepulauan Riau terancam tenggelam sampai wacana yang terbaru yaitu kemungkinan untuk melibatkan pihak asing berinvestasi di pulau-pulau kecil perbatasan dengan dengan perjanjian pemanfaatan yang saling menguntungkan. Saat ini pengelolaan di pulau-pulau kecil dan terisolir di Indoensia cenderung tertinggal, terlebih yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya budaya di pulau-pulau tersebut. Pemerintah bekerjasama dengan penduduk lokal harus bekerja keras merumuskan format bagaimana sebaiknya mengelola sumberdaya budaya di pulau-pulau kecil yang sempat tertinggal tersebut. Sayangnya, dalam pembangunan pulau-pulau kecil, sering kali keberadaan

\* Penulis adalah Peneliti Muda pada Balai Arkeologi Banjarmasin: Email: aryandi2005@yahoo.co.id dan anuralang\_balarbjm@yahoo.com

organisasi lokal dan segala kekhasannya diabaikan. Wiarda (1983) yang menfokuskan analisisnya terhadap konsep pembangunan mengkritik kebiasaan pembangunan yang mengacu pada 'konsep barat' dan mengabaikan institusi tradisional. Penulis menyetujui pandangan Wiarda tersebut dan mengusulkan bahwa peningkatan perhatian terhadap variabel lokal mutlak diperlukan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, kebijakan yang meletakkan pemerintah daerah sebagai mesin utama lokomotif pengelolaan pulau-pulau kecil dalam era otonomi tampaknya merupakan langkah yang tepat. Hal ini karena pemerintah daerahlah yang dianggap dan seharusnya mengenal potensi pulau-pulau kecil yang merupakan wilayahnya. Dalam konteks ini, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pulau-pulau kecil di wilayahnya dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya.

Semangat otonomi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil bukan berarti tanpa kelemahan dan masalah. Seperti yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh beberapa pengamat, potensi para pengambil kebijakan di daerah yang bertindak di luar batas sebagai akibat dari euforia desentralisasi berpeluang menghambat tercapainya tujuan otonomisasi pengelolaan pulau-pulau kecil. Selain itu, kekhawatiran praktek-praktek 'chauvinism' berlebihan juga memiliki potensi kontribusi kegagalan yang sama.

Sebagai entitas yang memiliki karakteristik khusus, pengelolaan pulau kecil dan terpencil memerlukan format yang agak berbeda dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas dan mudah dijangkau. Salah

satu kehususannya adalah ukuran luas daratan yang menyebabkan terbatasnya prasarana dan sarana. Luas pulau yang sempit itu sendiri bukanlah suatu kelemahan terdapat keseimbangan antara jumlah penduduk, barang dan jasa yang dapat diproduksi di pulau kecil tersebut. Keadaan menjadi berbeda jika keseimbangan tidak tercapai karena jumlah penduduk terus meningkat.

Kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya budaya di pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan, pengembangan pariwisata budaya merupakan salah satu pilihan yang dapat ditawarkan. Akan tetapi jangan sampai pariwisata yang akhir-akhir ini dianggap sebagai dewa penolong (*panacea*) bagi pembangunan pulau-pulau kecil, malah merusak budaya lokal karena masuknya budaya asing yang dibawa oleh wisatawan (asing) dianggap tidak sesuai dengan budaya atau agama setempat. Hal seperti ini dikhawatirkan oleh Francillon (1990). Bagaimana halnya dengan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan? Penulis akan menawarkan beberapa solusi.

## B. Kasus Di Kalimantan Selatan

Dari 150 pulau di Kalimantan Selatan, sebagian di antaranya belum memiliki nama, terancam lepas dan dikuasai propinsi lain. Gugusan pulau, yang tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut itu, belum didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri. Menurut Gubernur Rudy Arifin, dalam waktu dekat pihaknya akan mendata pulau-pulau tersebut (Banjarmasin Post) apalagi, sebagian besar pulau-pulau itu menggunakan nama kedaerahan sehingga belum begitu dikenal

di tingkat nasional. Contohnya, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan dan Pulau Kembang. Pulau Sebuku di Kotabaru letaknya sangat dekat dengan Surabaya, Jawa Timur, jika dibandingkan dengan Banjarmasin. Akibatnya, Pulau Sebuku, yang kaya batu bara, sangat rawan jika tidak segera diregistrasi sebagai dari propinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, gubernur meminta semua bupati maupun walikota segera mendata pulau-pulau yang ada di daerahnya.



Sebanyak 31 pulau kecil di wilayah Kotabaru belum memiliki nama. Ke-31 pulau itu tersebar di Kecamatan Pulau Laut Selatan (12 pulau), Pulau Laut Barat (1 pulau), Sampahan (3 pulau), dan Pamukan Selatan (1 pulau) serta Kalumpang Tengah (14 pulau). Semua pulau itu di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten sehingga tidak ada yang berhak memperjualbelikannya tanpa seizin Pemkab. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru Sabrie Madani mengatakan selama ini telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat pesisir soal pulau-pulau tersebut. Termasuk saat akan memberikan nama, rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat disampaikan ke Pemkab dan akan diteruskan ke pusat, sebelum

mendapat persetujuan nama pulau yang bersangkutan.

Beberapa pulau yang ada di Kabupaten Kotabaru, propinsi Kalimantan selatan memiliki potensi untuk dikelola secara efektif dan efisien untuk menambah pendapatan daerah. Kabupaten Kotabaru sebagai daerah pertambangan (batubara, bijih besi dan lain-lainnya), tetapi wilayah Kotabaru juga memiliki potensi ekonomi lain yang baik untuk dikembangkan melalui pulau-pulau kecil yang ada.

Berikut adalah tabel pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang tersebar di 16 Kecamatan. Telah ada usaha untuk mulai memberdayakan pulau-pulau kecil yang terdapat di 8 kecamatan pada tabel di bawah.

Kecamatan Pulau Laut Selatan	Kecamatan Pulau Laut Barat	Kecamatan Pulau Laut Timur	Kecamatan Sampanahan	Kecamatan Kalumpang Hulu	Kecamatan Kalumpang Tengah	Kecamatan Pulau Sebuku	Kecamatan Pulau Sembilan
1. Birah-Birahan	1. Kunyit	1. Halaban	1. Jaring	1. Tanah Merah	1. Nangka Kecil	1. Samer	1. Danawan
2. Kerayaan	2. Terusan Tengah	2. Penentuan	2. Tugu	2. Langadai	2. Nangka	2. Gelap	2. Maradapan
3. Ondong	3. Hantu		3. Tanah merah	3. Bini	3. Tabuan	3. Alang	3. Marabatuan
4. Kerumputan	4. Tokong			4. Laki	4. Burung	4. Malengkau	4. Payung-Payungan
5. Kerasian				5. Sari	5. Bidan	5. Haur	5. Payung-Payungan Kecil
6. Serunding					6. Suren	6. Perdamaian Besar	6. Batu Utara
7. Kapak					7. Bayar	7. Perdamaian Kecil	7. Batu Selatan
8. Kapak kecil						8. Gosong Mangkok	8. Sarang
9. Anak Kerayaan						9. Manti	9. Batu Tengah
10. Cinta						10. Kuluang	10. Pamilikan
11. Bali						11. Manti Kecil	11. Kunyit
							12. Matasini
							13. Janda
							14. Dare
							15. Kalambau

Di antara pulau-pulau kecil tersebut, Pulau Sembilan sangat potensial untuk lebih diberdayakan dengan pengembangan wisata budaya karena memiliki daya tarik wisata dengan binatang penyunya yang bertelur di malam hari, *scuba diving* (wisata menyelam) karena memiliki keindahan bawah laut. Di samping itu di pulau tersebut terkenal juga dengan pantainya yaitu pantai Sarang Tiung yang cukup indah dengan bebatuan gunung yang menjorok. Bukan hanya wisatawan lokal yang mendatangi pantai tersebut. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Pulau Sembilan. Banyaknya pengunjung ke lokasi tersebut tak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di lokasi pantai, seperti pondokan (rumah bermalam keluarga yang disewakan), tenda-tenda di

pinggiran pantai dan di atas kolam, tempat ibadah, lahan parkir yang luas serta keamanan yang terjamin. Potensi wisata lain di sekitarnya yaitu pantai Gedambaan di Pulau Laut. Di pantai ini akan dibangun beberapa sarana antara lain: tempat istirahat, akuarium besar, taman buah dan bunga, cermin seribu bayangan, sirkuit mini, ruang wahana fisika, studio rekaman mini, dan *camping ground*, *game stations* (di antaranya tempat bowling dan beberapa sarana olah raga lainnya, id. Kabupaten Kotabaru).

Rencana pengembangan sebaiknya berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat dan kearifan lokal, dikembangkan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga tradisional/lokal dan LSM yang

berminat. Pulau Karayan yang sekarang dipakai sebagai tempat lomba perahu layar (*katir race*) (foto 01) dapat lebih dikembangkan dengan menghadirkan atraksi budaya. Aplikasi rencana ini tidaklah mudah karena fasilitas sarana maupun prasarana dibangun secara bertahap. Masalah pemerintah daerah melakukan pemba-

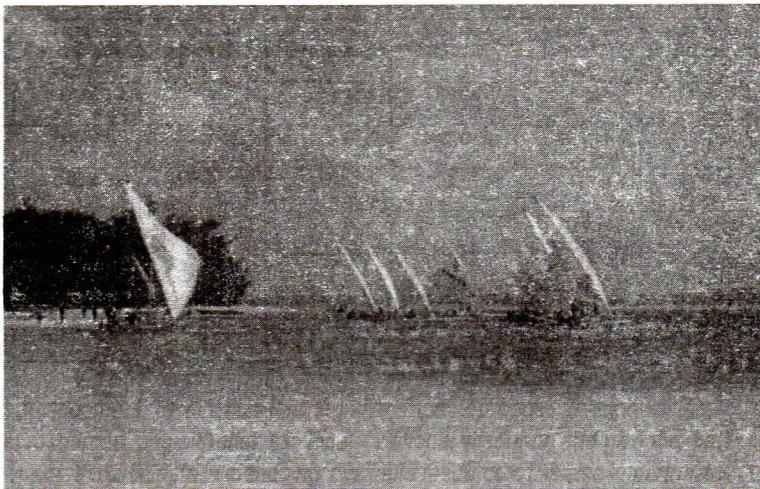


Foto 01. Lomba Katir Race di Pulau Kerayaan, Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan

ngunan dengan skala prioritas. Lebih menarik lagi, di pantai ini sering diadakan upacara Adat *Maccerasasi* yaitu upacara adat pemotongan *hadangan* (kerbau), sebagai bentuk rangkaian ritual adat tersebut. Acara adat dilanjutkan dengan pelepasan perahu *bagang* (alat tangkap teri) ke laut. Ratusan perahu nelayan jenis balapan berjejer di sepanjang garis pantai untuk dilepas secara simbolis menuju bagang di sekitar pantai Sarang Tiung. Acara ini dilanjutkan dengan acara tari-tarian adat yang bertujuan menghibur masyarakat dan pengunjung. Diusulkan juga kepada pemerintah daerah dan perancang busana untuk bisa menampilkan rancangan busana modifikasi kain sasirangan.

Pengelolaan pulau-pulau lainnya bisa secara bertahap. Misalnya Pulau Birah-birahan untuk sementara dijadikan tempat pelelangan ikan. Harus ada peraturan daerah bahwa semua nelayan harus menjual ikannya di Pulau Birah-birahan

yang masih memiliki pasar tradisional terapung agar masyarakat juga mempunyai keinginan untuk datang di Pulau Birah-Birahan. Tentunya dilengkapi dengan sarana dan prasarana jalan yang memadai misalnya angkutan perahu. Di pulau ini juga terdapat sumber air panas dan penyu bertelur.

Pengembangan wisata budaya di Pulau Laut yang saat ini lebih menonjol sebagai daerah tambang juga dapat dilakukan. Kotabaru adalah daerah yang penduduknya multi etnik (Suku Banjar, Dayak Bukit, Dayak Samihim, Mandar, Bajau, Bugis, Jawa dan Tionghoa Indonesia). Masing-masing suku memiliki budaya khasnya apabila dikelola dengan baik dan disatukan dalam satu wadah atraksi budaya, misalnya pada saat upacara adat *Maccerasasi* (pesta adat di laut untuk mensyukuri hasil laut yang dihasilkan, kegiatan ini dilakukan oleh para nelayan yang berasal dari Suku Bugis dan Mandar) Pada penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin

di Pulau tersebut telah ditemukan penambangan batubara peninggalan masa Kolonial, yaitu penambangan batubara Semblimbing (Kusmartono dan Nuralang, 2001).

Salah satu kendala pengembangan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan adalah ukuran yang kecil dan agak terisolasi sehingga penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal. Di samping itu, sumber daya manusia dengan keahlian mengelola wisata budaya masih langka. **penawaran langkah pengembangan wisata budaya di pulau-pulau kecil** Pengembangan pulau-pulau kecil pada dasarnya merupakan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Sebelum menetapkan pola pengembangan pulau-pulau kecil misalnya, secara makro harus ada semacam kesepakatan terhadap konsep pemberdayaan yang akan diterapkan pada pulau-pulau kecil itu di antara 'stakeholders'. Setidaknya ada tiga dasar pemikiran mengapa pemberdayaan pulau-pulau kecil yang perlu kita laksanakan. Dasar pemikiran pertama adalah ekonomi. Pengembangan pulau-pulau kecil pada suatu wilayah ditargetkan akan memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik lokal maupun regional. Dasar pemikiran kedua adalah unsur pertahanan, yaitu pulau memiliki arti penting pada konteks kedaulatan dan keamanan negara. Pulau-pulau kecil berperan sebagai titik pangkal teritorial maupun basis pangkalan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Nusantara. Dasar pemikiran ketiga adalah unsur konservasi yaitu sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial

budaya, ataupun kearifan lokal yang hanya ditemukan pada suatu pulau.

Sebagai negara maritim, pada satu sisi Indonesia memang memiliki potensi sumber daya alam yang tidak ternilai. Namun di sisi lain, tantangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya juga sangat besar. Langkah penyusunan pengembangan pulau-pulau kecil yang didukung oleh survei dan pemetaan daya dukung sumber daya yang akurat, merupakan langkah awal untuk menentukan solusi pembangunan negara kepulauan (Sulistiyo, 2003). Dalam survei tersebut, pulau-pulau dikelompokkan berdasarkan potensinya. Pengelompokan pulau akan memudahkan kita dalam menyusun strategi pengelolaannya. Konsep serupa ini dapat memberikan masukan awal terhadap perencanaan dan pengelolaan kawasan pulau-pulau di Indonesia, khususnya pulau-pulau kecil yang sangat jauh jangkauannya dari pulau-pulau besar. Masih banyak faktor lain yang cukup berarti sebagai masukan perumusan perencanaan dan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil, di antaranya adalah beragamnya kondisi alam setempat. Kondisi alam yang berbeda dari setiap kelompok pulau, terutama kondisi oseanografi, hidrografi, geologi, morfologi dan iklim berpengaruh dalam pengembangan wisata budaya di pulau-pulau tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan daya dukung itulah kemudian dapat dipikirkan bagaimana sebaiknya pemberdayaannya, terutama pengembangan wisata budaya. Masyarakat, swasta dan pemerintah diharapkan memiliki porsi keterlibatan yang berimbang. Keterlibatan ini diharapkan

dapat meminimalkan dampak negatif pengembangan wisata budaya. Disinilah fungsi kehati-hatian pembangunan, yang diharapkan lewat penataan kelembagaan dan tatanan sosial dalam mengejawantahkan pembangunan yang harmonis.

#### D. Penutup

Pemberdayaan pulau-pulau kecil dan kemungkinan penerapan wisata budaya di Kalimantan Selatan memberi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meminimalkan dampak negatif akibat penerapan wisata budaya di pulau-pulau kecil Kalimantan Selatan kiat-kiat yang saya usulkan adalah: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, mengacu pada kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut, meningkatkan kesempatan pengusaha lokal atau nelayan untuk melakukan usaha pemanfaatan, serta memperhatikan fenomena ekonomi. Pengembangan pulau-pulau kecil pada suatu wilayah ditargetkan akan memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik lokal maupun regional.

Dalam konsep negara maritim, pulau memiliki arti penting pada konteks kedaulatan dan keamanan negara. Fenomena pertahanan dimaksudkan sebagai upaya menempatkan fungsi pulau-pulau kecil sebagai titik pangkal teritorial maupun basis pangkalan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Nusantara, fenomena konservasi. Fenomena ini dimaksudkan sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal yang hanya ditemukan pada suatu pulau dan tidak terdapat di tempat lain.

Sebagai negara maritim, pada satu sisi Indonesia memang memiliki potensi sumber daya alam yang tidak ternilai. Namun di sisi lain, tantangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya juga sangat besar. Langkah penyusunan *clustering* pulau dan penetapan fenomena pengembangan pulau-pulau kecil yang didukung oleh survei dan pemetaan daya dukung sumber daya yang akurat, bisa merupakan salah satu solusi pembangunan negara kepulauan.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Khaerul dan Nara Nasrullah. 2006. "Melunturnya Nilai Tradisi Leluhur", *Kompas, Sabtu, 4 Februari 2006*:14
- Bengen, Dietrieecch G. 2003. "Perspektif Global Pengelolaan Pulau-pulau kecil Indonesia", *Kompas, Rabu, 9 Juli 2003*:33.
- Lopulalan, Dicky dan Muhtaman, Dwi R. 2003. *Berau Surya di Timur Laut Kalimantan: Sebuah panduan Perjalanan*. Tanjung Redeb: Yayasan Kalbu (Yayasan Konservasi Alam Lingkungan dan Kebudayaan). hlm. 189-197.
- Nuralang, Andi. 2005. *Huma Tugal: Sistem Ekonomi Orang Bukit, Tradisi dan Refleksi Nilai-nilai Lokal dalam Dinamika Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan*. Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat Kalimantan.
- Sulistiyo. Budi. 2003. "Solusi Pembangunan Negara Kepulauan", *Kompas, Rabu 9 Juli 2003*:35.
- Suhana. 2003. "Stop Resentralisasi Pembangunan Kelautan di Pulau-pulau kecil. (Tanggapan Atas Rencana Pengelolaan 88 Pulau Kecil di Perbatasan)", *Kompas, Rabu, 9 Juli 2003*:34.
- Artha, Artum. 1970. *Sejarah Kota Bandjarmasin*. Bandjarmasin: Museum Bandjar Lambung Mangkurat.
- Kusmartono, Vida Pervaya R dan Nuralang, Andi. 2001. "Kehidupan Sosial Ekonomi dan Perdagangan di Daerah Pesisir Tenggara Kalimantan Pada Abad ke-19 Masehi", *Berita Penelitian Arkeologi No.08*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Ideham, Suriansyah M, dkk (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
- Saleh, M. Idwar. 1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Gunadi dkk. 2004. *Sungai dan Kehidupan Masyarakat di Kalimantan*. Banjarbaru: IAAI Komda Kalimantan.